

# JURNAL PENELITIAN

VOLUME XXIII, NOMOR 2, OKTOBER 2008

MENGOPTIMALKAN PERAN PSL DALAM MEMBERDAYAKAN AMDAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh *Achmadi Susilo, Miftahul Huda Dan Titin Setyo Rini*

TOKSISITAS EKSTRAK DAUN KECUBUNG TERHADAP MORTALITAS HAMA PENGISAP POLONG KEDELAI

Oleh *Elka Joeniarti dan Achmadi Susilo*

PEMBUATAN KURMA DARI TOMAT (*LYCOPERSICON ESCULENTUM*) : KAJIAN DARI KONSENTRASI GULA DAN CARA PENGERINGAN TERHADAP KESUKAAN KONSUMEN

Oleh *Endang Noerhartati, Tri Rahayuningsih, Fungsi Sri Rejeki, Endang Retno Wedowati Dan Diana Puspitasari*

PROSES PEMBUATAN BAKSO IKAN TONGKOL (*EUTHYNNUS SP*) KAJIAN TERHADAP ASPEK KUALITAS DAN ASPEK FINANSIAL

Oleh *Fungsi Sri Rejeki, Endang R. Wedowati, Itha Mayasari*

PENDARAHAN PADA KEHAMILAN TRISEMESTER I : ABORTUS OEH KARENA KELAINAN KROMOSOM

Oleh *Herry Kurniawan Gondo.*

PATOLOGI DAN DETEKSI HUMAN IMMUNEDEFICIENCY VIRUS

Oleh *Ibrahim Njoto*

ANALISIS PRODUKSI, PENDAPATAN PETANI TAMBAK BANDENG DAN UDANG DIDESA BOGOBABADAN KECAMATAN KARANG BINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

Oleh *Nugrahini SW, Aminah Nur Janah*

MANUPULASI 2,4 DICHLOROPHENXYACETIC ACID DAN KINETIN TERHADAP PROPAGASI *Jatropha Curcas L* In Vitro

Oleh *Ribkahwati, Sri Arijanti Prakoeswa Dan Jajuk Herawati*

DIALEK SOSIAL MASYARAKAT SURABAYA

Oleh *Ribut Surjewati*

ANALISA TERHADAP POROSITAS DALAM BETON NORMAL DENGAN AGREGAT KASAR DARI LIMBAH PECAHAN KERAMIK

Oleh *Wiwik Purwiningsih.*

JURNAL PENELITIAN	Volume XXIII	Nomor 2	Halaman 1-90	Surabaya Oktober 2008	ISSN 0854-638 x
----------------------	--------------	---------	-----------------	--------------------------	-----------------

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2008

**JURNAL PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

---

**JURNAL PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**Pelindung**

Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

**Penasehat**

Pembantu Rektor Bidang Akademik  
Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum  
Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, MS

**Ketua**

Drs. Suwartono, M.Si.

**Sekretaris**

Drs. Yoedi Hariyanto, CU

**Staf Redaksi**

Ir. Titin Setyorini, MT (Teknik)  
Ir. Achmadi Susilo, MS (Pertanian)  
Noor Tri Hastuti, SH, Mhum (Hukum)  
Djojo Dihadjo, SE, MM (Ekonomi)  
Dra. Azizah Ali, MSi (FISIP)  
Drs. Agung Pranoto, M.Pd (FBS)  
dr. Brahmana Putra Marjadi, MPH (Kedokteran)

**Tata Usaha**

Sulami, SP

**Alamat Redaksi**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Telpon. 031.5677577 (hunting) ps. 160 Fax. 031.5679791  
E-mail: uwks [sby@rad.net.id](mailto:sby@rad.net.id) Surabaya 60225

## DAFTAR ISI

1. *Mengoptimalkan Peran Psl Dalam Memberdayakan Amdal Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Era Otonomi Daerah* 1-9  
*Oleh Achmadi Susilo, Miftahul Huda dan Titin Setyo Rin*
2. *Toksisitas Ekstrak Daun Kecubung Terhadap Mortalitas Hama Pengisap Polong Kedelai* 10-13  
*Oleh : Elika Joeniarti Dan Achmadi Susilo*
3. *Pembuatan Kurma Dari Tomat (Lycopersicom Esculentum) : Kajian Dari Konsentrasi Gula Dan Cara Pengeringan Terhadap Kesukaan Konsumen* 14-19  
*Oleh : Endang Noerhartati, Tri Rahayuningsih, Fungsi Sri Rejeki, Endang Retno Wedowati Dan Diana Puspitasari*
4. *Proses Pembuatan Bakso Ikan Tongkol (Euthynnus Sp)Kajian Terhadap Aspek Kualitas Dan Aspek Finansial* 20-25  
*Oleh : Fungsi Sri Rejeki, Endang R. Wedowati, Itha Mayasari*
5. *Perdarahan Pada Kehamilan Trimester I : Abortus Oleh Karena Kelainan Kromosom* 26-37  
*Oleh : Harry Kurniawan Gondo*
6. *Patologi Dan Deteksi Human Immunodeficiency Virus* 38-46  
*Oleh : Ibrahim Njoto*
7. *Analisis Produksi , Pendapatan Petani Tambak Bandeng Dan Udang Di Desa Bogobabandan Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan* 47-55  
*Oleh : Nugrahini Sw, Aminah Nur Janah*
8. *Manipulasi 2,4 Dichlorophenxyacetic Acid Dan Kinetin Terhadap Propagasi Jatropha Curcas L In Vitro* 56-63  
*Oleh : Ribkahwati ,Sri Arijanti Prakoeswa Dan Jajuk Herawati*
9. *Dialek Sosial Masyarakat Surabaya* 64-81  
*Oleh : Ribut Surjowati*
10. *Analisa Terhadap Porositas Dalam Beton Normal Dengan Agregat Kasar Dari Limbah Pecahan Keramik* 82-90  
*Oleh :Wiwik Purwiningsih*

## MENGOPTIMALKAN PERAN PSL DALAM MEMBERDAYAKAN AMDAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh : Achmadi Susilo<sup>1)</sup>, Miftahul Huda<sup>2)</sup> dan Titin Setyo Rini<sup>3)</sup>

### ABSTRACT

Following the implementation of Government's Laws No 23/1997, and the Government's Regulations No 27/1999, a number of environmental management instruments including Environmental Impact Assessment (EIA) were implemented to handle environmental impacts associated with development activities. Despite the implementation of EIA and other environmental management instruments, environmental degradation was not significantly reduced but showed a tendency of increased. This, in part, was caused by the position of the EIA in decision cycle was not on strategic components (policy, plan or program) but on project level. The aims of this paper are to study the possibility of the Environmental Study Center in the Higher Education to increase the human resources quality for optimizing Regional AMDAL.

**Key Words :** *Amdal, Sustainable development, AMDAL role*

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia pada masa mendatang. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan pertama kali pada tahun 1987 oleh World Commission on Environment and Development.

Majalah time telah mengeluarkan edisi khusus (April - Mei 2000) tentang lingkungan hidup. Salah satu artikelnya berjudul "*Condition Critical*" melaporkan tentang kondisi lingkungan yang makin menurun, antara lain makin rusaknya lahan pertanian di berbagai negara, makin meluasnya "kawasan mati" di lautan akibat aliran limbah kimia dari daratan, hancurnya dasar laut karena penggunaan pukot harimau, serta tingginya tingkat kerusakan di sepanjang pantai.

Selanjutnya dalam artikel tersebut dikemukakan adanya berbagai kecenderungan yang mengkhawatirkan, antara lain 58% keadaan terumbu karang dunia telah terancam, 80% *grassland* kualitasnya menurun, 50% lahan basah sudah musnah, dan 20% lahan terancam menjadi padang pasir (Anonim, 2000). Keadaan tersebut semuanya disebabkan dampak negatif pembangunan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengingat semua pembangunan dirancang oleh manusia, maka faktor sumberdaya manusia merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan di muka bumi ini.

Sumberdaya manusia di daerah merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah. Terkait dengan reformasi di bidang politik dan pemerintahan, maka tuntutan yang bergulir saat ini adalah diberikannya otonomi daerah yang lebih luas sehingga daerah dapat mengatur sendiri daerahnya untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang selama ini dikelola oleh pemerintah pusat. Terkait dengan hal tersebut maka daerah akan membutuhkan SDM yang berkualitas, yang lebih mampu dan

1) Dosen Fakultas Pertanian dan anggota PSL UWKS

2) Dosen fakultas Teknik UWKS

3) Dosen Fakultas Teknik dan anggota PSL UWKS

siap pakai dalam mengelola SDA masing-masing daerah dalam kerangka mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah.

Eksplorasi SDA yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terkendali tentu saja akan mengarah kepada kerusakan lingkungan secara permanen, kecuali apabila SDA tersebut dimanfaatkan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selama ini kemampuan pemerintah daerah (Pemda dan Pemkot) dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk masing-masing daerahnya masih sangat terbatas, dan dibawah kendali pemerintah pusat.

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan lestari dalam implementasi pembangunan di daerah, maka setiap daerah sebenarnya telah memiliki dan dapat menggunakan payung hukum yang sudah ada yakni UU No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Seperti yang telah ditegaskan dalam salah satu pasalnya bahwa "daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang ada di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada". Sehubungan dengan hal ini maka peranan dan kinerja dari Pemda atau Pemkot amat berperan penting terutama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Mengingat adanya heterogenitas dari tiap Pemda / Pemkot yang memiliki keterbatasan dalam kewenangan, keterbatasan SDM dan pengembangan daerah lebih cepat untuk mengantisipasi persaingan di era globalisasi, maka untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, pemberdayaan daerah menjadi amat penting dan hal ini memerlukan dukungan dan bantuan semua pihak termasuk keberadaan Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang ada di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebagai institusi akademik yang berada di bawah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat suatu perguruan tinggi, maka peran PSL amat strategis, terutama bekerjasama dengan Pemda atau Pemkot untuk memberdayakan masyarakat di daerah dalam

mewujudkan pembangunan di daerah agar tidak merusak lingkungan.

Salah satu instrumen penting yang dapat diimplementasikan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat adanya suatu kegiatan proyek atau pembangunan di daerah adalah AMDAL. PSL dapat berperan penting dan amat strategis dalam rangka mensosialisasikan serta memberikan motivasi kepada masyarakat di daerah akan pentingnya Amdal bagi setiap pembangunan yang berdampak penting terhadap kehidupan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peranan, kontribusi dan tantangan ke depan PSL di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam meningkatkan kualitas SDM pengelola lingkungan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan AMDAL di daerah.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. AMDAL DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### a. AMDAL dalam Pembangunan Daerah

Amdal merupakan suatu kajian mengenai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk mengambil keputusan (Mukono, 2005). Hal-hal yang dikaji dalam proses amdal adalah : aspek fisik-kimia, ekologi (biologi), sosial – ekonomi – budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Amdal di satu sisi merupakan bagian dari suatu studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan, di sisi lain merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan suatu kegiatan. Berdasarkan hasil analisis ini akan diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul akibat pembangunan sehingga

dapat dipersiapkan langkah-langkah untuk menanggulangnya.

Tujuan umum dari Amdal adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan dampak negatif akibat pencemaran lingkungan hingga serendah mungkin. Dengan demikian Amdal diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang rencana pelaksanaan suatu kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Agar pelaksanaan Amdal dapat berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka pengawasan amdal dikaitkan dengan perijinan. Lebih lanjut disebutkan bahwa Amdal adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha atau kegiatan (PP No 27 tahun 1999).

Di era otonomi daerah, kewenangan daerah akan sedemikian kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun suatu kebijakan di bidang lingkungan hidup, terutama masalah penanganan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. Pengelolaan LH amat penting di era otonomi daerah karena lingkungan hidup sudah menjadi isu internasional yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kewenangan propinsi terdiri atas kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota; sedangkan kewenangan kabupaten/kota, terdiri atas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan hidup.

#### **b. Penetapan Bentuk Kajian Lingkungan (AMDAL)**

Terdapat tiga alternatif untuk dokumen kajian lingkungan sesuai dengan besaran rencana kegiatan yang akan dilakukan yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau AMDAL. Dasar yang digunakan untuk penetapan kajian lingkungan adalah : UU No 23 Tahun 1997, PP No 27 Tahun 1999, dan

Peraturan Menteri Negara LH No 11 Tahun 2006. Ketentuan tentang penetapan bentuk kajian lingkungan secara bagan disajikan pada gambar 1.

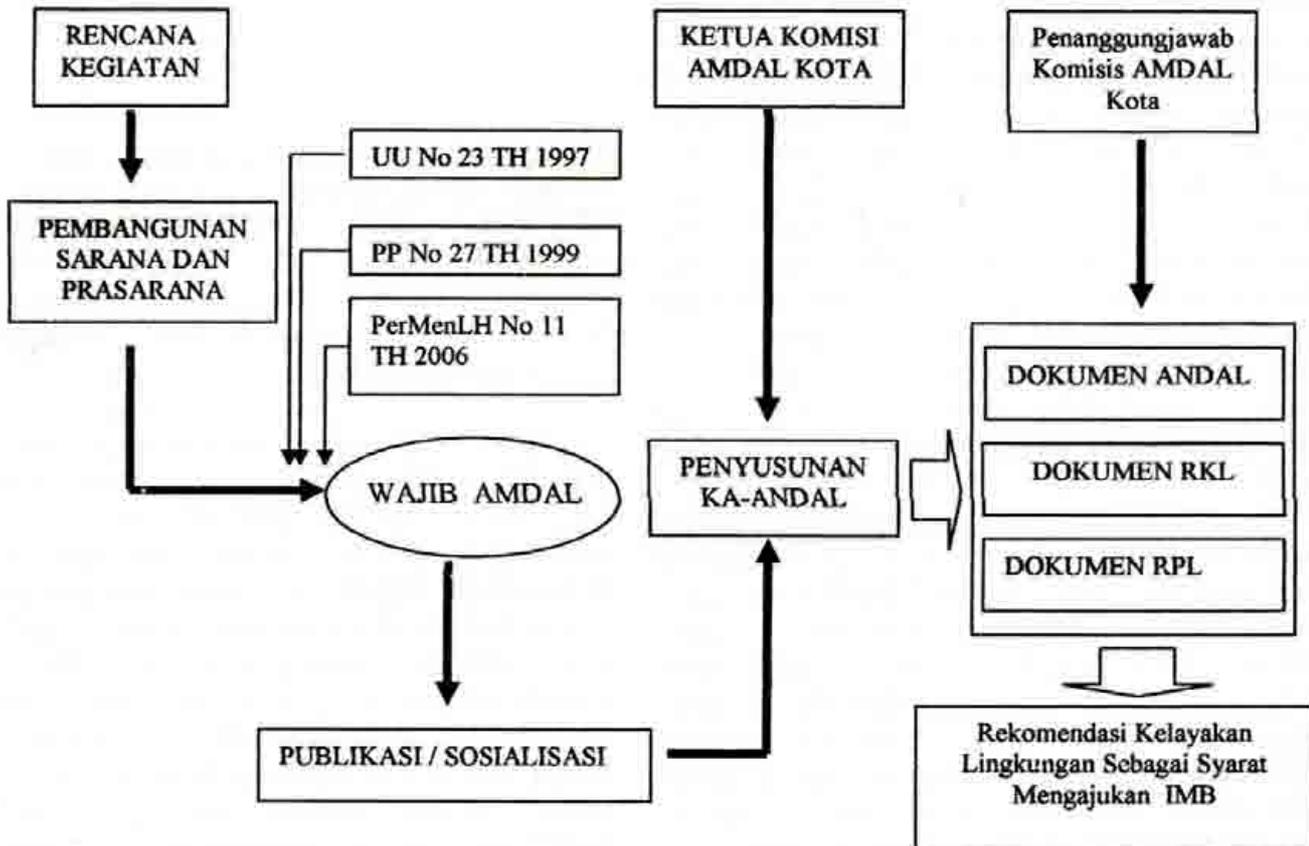
## **2.2. PERANAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK PENYELENGGARAAN AMDAL**

### **a. PSL dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses AMDAL.**

Jika kita berbicara mengenai partisipasi masyarakat maka ada dua hal yang mendasar yang perlu mendapat perhatian, yaitu : (1) bahwa partisipasi masyarakat adalah hak dari setiap warga negara (hak azasi manusia) dan hal ini dijamin oleh konstitusi (Pasal 28 UUD 1945), dan (2) partisipasi dalam AMDAL adalah salah satu dasar untuk mencapai tujuan AMDAL, yakni untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka AMDAL hanya akan menjadi mata rantai dari administrasi pemerintahan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang AMDAL. Dalam proses ini, masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, serta usulan penyelesaian masalah dari masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan memperoleh keputusan yang terbaik. Sedangkan menurut Heroepoetri (2000) partisipasi masyarakat diartikan sebagai bentuk kekuatan dan kedaulatan rakyat yang menempatkan masyarakat sebagai kekuatan untuk melakukan kontrol sosial terhadap setiap kekuatan yang diambil oleh pejabat negara.

Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Penetapan Langkah Kajian Lingkungan (Raharjo, 2007)

Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah bagaimana kepentingan masyarakat dapat dilindungi pada waktu terjadi eksploitasi (kegiatan pembangunan) atas lingkungan hidup. Sedangkan tujuan dari amdal adalah bagaimana agar masyarakat menjadi sadar (*aware*) akan adanya dampak negatif akibat aktivitas pembangunan, dan melakukan suatu tawaran (*trade off*) dari dampak yang mungkin ditimbulkan.

Dalam Keputusan Kepala Bapedal No 08 Th 2000 disebutkan bahwa hak masyarakat dalam proses AMDAL adalah : (a) memperoleh informasi mengenai : rencana kegiatan yang wajib AMDAL, semua dokumen AMDAL, proses penilaian, dan

keputusan hasil; (b) memberikan saran, pendapat dan atau tanggapan atas rencana dan atau kegiatan yang wajib AMDAL; (c) duduk sebagai anggota komisi Penilai AMDAL, khusus bagi warga yang terkena dampak; dan (d) memperhatikan tahapan proses kajian AMDAL. Sedangkan instansi bertanggungjawab dalam : (a) mengumumkan rencana atau usaha kegiatan yang akan menyusun AMDAL, (b) mendokumentasikan dan mengolah saran, (c) menyampaikan rangkuman hasil saran, pendapat, dan tanggapan dari warga, (d) menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan

penilaian semua dokumen, dan (e) memfasilitasi terlaksananya dengan baik hak warga masyarakat atas informasi dan berperan serta dalam proses AMDAL. Bagaimanakah implementasi program PSL dalam memberdayakan masyarakat terkait persoalan lingkungan hidup, khususnya AMDAL dapat direalisasikan melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **b. Tinjauan Peran PSL dari Aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi.**

### **1. Peran Langsung PSL Secara Kurikuler (aspek pendidikan dan pengajaran)**

PSL berperan penting dalam memberdayakan masyarakat secara kurikuler, yakni dengan cara memasukkan mata kuliah AMDAL ke dalam kurikulum sebagai salah satu mata kuliah pada Program Studi / Fakultas tertentu terutama yang terkait erat dengan persoalan lingkungan. Dengan demikian maka masyarakat (dalam hal ini diwakili oleh mahasiswa) dapat secara langsung mendapatkan mata kuliah AMDAL. Dengan mengikuti kuliah AMDAL, para mahasiswa akan mengetahui, mengerti, dan memahami tentang persoalan AMDAL sebagai salah satu perangkat preventif sebelum melakukan aktivitas pembangunan yang berwawasan lingkungan; cakrawala pikiran mereka akan terbuka luas bahkan para mahasiswa dapat pula dilatih untuk membuat salah satu bagian dari dokumen AMDAL sebagai salah satu tugas mata kuliah tersebut. PSL memiliki SDM (para dosen) yang berkualitas, yang dapat diambil dari berbagai Fakultas di lingkungan Perguruan Tinggi tersebut. Para dosen lingkungan adalah mereka yang telah banyak berpengalaman secara langsung baik melakukan kegiatan penelitian tentang permasalahan lingkungan, maupun sebagai konsultan yang ikut secara aktif dalam penyusunan dokumen AMDAL. Dengan demikian mereka cukup profesional dan tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mentransfer pengetahuannya (khususnya AMDAL) kepada para mahasiswa yang merupakan wakil dari masyarakat. Metode mentransfer pengetahuan tentang amdal

kepada mahasiswa adalah dalam bentuk tatap muka di kelas (klasikal), mengerjakan tugas (*assignment*), diskusi di kelas, dan evaluasi (UTS dan UAS). Langkah selanjutnya setelah para mahasiswa lulus, diharapkan mereka dapat mentransfer pengetahuannya tentang amdal kepada masyarakat yang lebih luas lagi.

### **2. Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu.**

Amdal sebenarnya merupakan salah satu dokumen penting yang bersifat ilmiah. Untuk meningkatkan peranan PSL dalam memberdayakan amdal dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu, maka pilar utamanya sebenarnya terletak pada peran dosen yang selama ini menekuni bidang lingkungan hidup. Peranan dosen sangat penting dalam melakukan kegiatan penelitian yang terkait dengan komponen-komponen amdal. Jenis penelitian yang dapat dikembangkan misalnya : penelitian tentang biologi, ekosistem, pencemaran (darat, laut, udara), ekonomi lingkungan, kesehatan lingkungan, aspek fisik lingkungan, hukum lingkungan, aspek sosial budaya, dan kebiasaan masyarakat tentang lingkungan, dll. Semua hasil penelitian tersebut muaranya adalah mendukung dan memperkuat data-data riil tentang rona lingkungan di suatu daerah, meliputi rona lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan faktor lainnya yang selama ini menjadi parameter terukur dari suatu studi amdal untuk melihat adanya perubahan lingkungan akibat pembangunan. Hasil penelitian dari para dosen tersebut selanjutnya dapat dideseminasikan pada forum seminar/ kongres / konferensi nasional tentang lingkungan hidup serta dikomunikasikan melalui media cetak di berbagai jurnal baik tingkat nasional, regional maupun internasional.

### 3. Peran PSL mengoptimalkan amdal melalui Program Pengabdian masyarakat

Kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di setiap daerah perlu untuk ditingkatkan, untuk itu perlu disusun suatu program dalam skala yang lebih besar serta disusun dengan cepat. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Pemda atau Pemkot tentu saja dapat melakukan kerjasama dengan berbagai institusi di bidang lingkungan hidup yang memiliki kompetensi dan kapabilitas, terutama untuk penyusunan Amdal. Salah satu institusi yang memiliki SDM yang berkompoten dan qualified dalam membuat program pengelolaan lingkungan terutama menyusun Amdal adalah institusi Perguruan tinggi, khususnya PSL.

PSL merupakan suatu lembaga akademik dan kedudukannya pada beberapa perguruan tinggi berada di bawah kendali Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Oleh karena itu tugas pokok PSL disamping mengadakan penelitian dan pengembangan ilmu yang dilakukan oleh para dosen, juga melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yakni mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat. Salah satu tugas PSL terkait dengan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai *Training provider* yang memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat mengenai masalah lingkungan hidup, terutama tentang amdal.

Berdasarkan substansinya, kita dapat mengelompokkan program pelatihan tentang mengelola lingkungan hidup di daerah menjadi dua kelompok, pertama adalah pelatihan bersifat umum, dan ke dua pelatihan yang bersifat khusus. Pelatihan bersifat umum lebih diarahkan untuk semua staf yang bekerja di bidang lingkungan hidup, manajer kelas menengah maupun pemula. Sedangkan materi pelatihan khusus adalah menyangkut aspek-aspek teknis tertentu (Tabel 1.).

Tabel 1. Beberapa contoh materi program pelatihan/kursus tentang lingkungan hidup yang dapat diselenggarakan oleh setiap PSL di Perguruan Tinggi.

No	Jenis pelatihan	Program pelatihan	Sasaran
I	Umum	Pengantar Pengelolaan lingkungan Filosofi tentang I H	Semua staf perusahaan, pemula, manajer menengah, dll
II	Khusus / teknis	- Penyusunan dokumen AMDAL - Pengelolaan kawasan pantai - Pengelolaan kawasan pesisir - Pengelolaan sampah kota - Pengelolaan Limbah - Pengelolaan lingkungan kota - Keanekaragaman Hayati - Pengelolaan DAS - Teknik milihan dan memilah Sampah Rumah tangga - Produk Pertanian Organik - Komposter resapan, dll	Mereka yang dapat mengikuti kegiatan ini antara lain : a. Staf teknis dari instansi tertentu, yang sesuai dengan bidangnya masing-masing b. Pimpinan instansi pemerintah c. Pimpinan instansi swasta d. Masyarakat umum

Tabel di atas adalah menunjukkan kontribusi PSL dalam memberdayakan masalah lingkungan hidup kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan/kursus yang dapat diselenggarakan secara rutin. Selain itu PSL dapat secara khusus untuk memberikan kursus tentang AMDAL kepada masyarakat luas, meskipun hal ini tidak mudah dilaksanakan terutama bagi masyarakat di daerah. Salah satu persoalan yang akan muncul adalah kendala dalam penyelenggaraan karena mahalnya penyelenggaraan yang harus ditanggung oleh institusi penyelenggara.

### 2.3. KENDALA DAN TANTANGAN PSL DALAM IMPLEMETASI AMDAL

Banyak pihak telah melakukan evaluasi yang menunjukkan bahwa proses AMDAL di Indonesia memiliki banyak kelemahan. Menurut Hendartomo (2005), kelemahan tersebut diantaranya amdal belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perijinan satu rencana kegiatan pembangunan, sehingga belum dapat digunakan sebagai instrumen untuk menolak atau mengijinkan suatu pembangunan, masyarakat masih belum sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam proses amdal. Meskipun LSM telah mengambil peran mengikuti sidang-sidang komisi AMDAL, akan tetapi suaranya belum bisa diterima dalam proses pengambilan keputusan, kelemahan yang nampak dari Amdal adalah belum adanya jaminan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dalam studi AMDAL, UKL, dan UPL akan dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa proyek, dan masih terdapat kelemahan dalam metode-metode AMDAL, khususnya aspek "Sosial Budaya. Sehingga dampak negatif pembangunan ke arah aspek sosial budaya kurang dikaji secara seksama. Tidak kalah pentingnya adalah pasca Dokumen AMDAL mendapatkan pengesahan atau rekomendasi baik dari Kepada daerah Kabupaten/Kota bahkan Gubernur, kegiatan pemantauan lingkungan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kegiatan pengelolaan lingkungan tidak berjalan secara rutin dan berkelanjutan termasuk upaya untuk melakukan pelaporan dari pemrakarsa atau pemilik kegiatan, dimana hal ini semakin melemahkan kontrol terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat tentang AMDAL oleh PSL dilakukan dengan melihat adanya peluang diantara kelemahan dan kendala yang ada dalam implentasi AMDAL selama ini. Tantangan ke depan yang dihadapi PSL dalam pemberdayaan masyarakat terkait implementasi amdal melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah : (a) dalam bidang pendidikan dan pengajaran : tidak semua perguruan tinggi secara kurikuler memilih dan memasukkan AMDAL sebagai salah satu mata

kuliah baik wajib maupun pilihan (kecuali jurusan Teknik Lingkungan atau perguruan tinggi yang memiliki pola ilmiah pokok lingkungan), (b) di bidang penelitian dan pengembangan ilmu : tidak banyak dosen (karena keterbatasan pengetahuan tentang amdal) yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan amdal; penelitian terkait amdal memerlukan dukungan dana yang tinggi, sehingga sangat terbatas dilakukan oleh staf pengajar kecuali mereka yang mendapatkan cukup dana penelitian dari institusi lain; hasil penelitian bidang amdal juga masih jarang dipublikasikan (kalah dengan publikasi non lingkungan), dokumentasi hasil penelitian masih terbatas, dan sistem admintrasi dokumen amdal juga masih lemah sehingga sulit diakses langsung oleh masyarakat , (c) di bidang pengabdian masyarakat : (1) sosialisasi atau penyuluhan tentang AMDAL umumnya hanya dalam batas diskusi dan pengarahan sehingga membosankan, seharusnya diikuti oleh praktek langsung sehingga dapat dipahami oleh masyarakat secara luas, (2) masyarakat kita yang masih sangat heterogen dalam pendidikan, latar belakang, budaya, agama, serta politik, sehingga cukup menyulitkan pada saat dilakukan penyuluhan, (3) Budaya paternalistik sering masih lebih dominan di daerah tertentu, sehingga diperlukan kerjasama dan pemahaman yang sama dengan tokoh masyarakat, dan adat setempat, dan (4) persoalan klasik yakni dukungan dana. Umumnya jika kegiatan pelatihan/kursus dilaksanakan secara mandiri, maka beban pembiayaan tentu akan ditanggung oleh peserta kursus tersebut sehingga kurang menarik bagi masyarakat karena dianggap mahal, sehingga implementasi masalah amdal kepada masyarakat secara langsung tidak dapat diselenggarakan secara optimal.

Walaupun Amdal ini di Indonesia telah diterapkan lebih dari 20 tahun, namun masih dijumpai banyak hambatan. Kendala dimaksud lebih mengarah pada faktor-faktor teknis, seperti misalnya penataan hukum masih lemah

(Sugiyono, 2002), masih adanya kekuatan institusi yang memiliki pengaruh, ketersediaan data masih amat terbatas, pelatihan Ilmiah dan profesional, karakter budaya, dan perilaku sosial politik masyarakat Indonesia (sangat mempengaruhi bentuk penerapan AMDAL di lapangan). Kebijakan dan program tentang lingkungan di Indonesia hingga saat ini masih bersifat "top down" oleh pemerintah sendiri. Inisiatif *top down* muncul bukan karena adanya kebutuhan menganalisis dampak, tetapi sebagai tanggapan terhadap perkembangan barat. Hal ini berbeda dengan di negara barat, program dan kebijakan lingkungan dibuat karena adanya kebutuhan masyarakat, sehingga inisiatif bersifat "bottom up".

#### 4. PENUTUP

Kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di setiap daerah masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi infra struktur maupun sumberdaya manusianya. Untuk itu perlu disusun suatu program mengenai lingkungan hidup di daerah secara komprehensif. Salah satu instrumen penting yang dapat diimplementasikan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat adanya suatu kegiatan proyek atau pembangunan di suatu daerah adalah AMDAL. Pusat Studi Lingkungan sebagai lembaga pendidikan akademik Perguruan Tinggi berperan amat penting dan strategis dalam memberdayakan masyarakat untuk menyelenggarakan AMDAL, diantaranya dilakukan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (baik di bidang pendidikan & pengajaran; penelitian dan pengembangan ilmu, serta di bidang pengabdian pada masyarakat). Meskipun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan ditemui banyak kendala, baik hambatan yang bersifat teknis, maupun non teknis, seperti hambatan ekologis, sosial, ekonomi, psikologis, dan hambatan budaya masyarakat. Semua hambatan tersebut sebagai tantangan ke depan bagi PSL dalam mengoptimalkan kegiatan amdal di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1997. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1997, Pengelolaan Lingkungan Hidup
- \_\_\_\_\_. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 tahun 1999, Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- \_\_\_\_\_. 2000.a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom.
- \_\_\_\_\_. 2000.b. Keputusan Kepala Bapedal No 08 Tahun 2000. Keterlibatan masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses AMDAL.
- \_\_\_\_\_. 2001. Keputusan Menteri Negara LH, tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai dampak Lingkungan
- \_\_\_\_\_. 2005. Apa Yang benar dengan AMDAL. Suatu studi atas praktek amdal yang baik di beberapa Propinsi di Indonesia.  
<http://sisteresources.worldbank.org>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2008.
- Hendartomo, T. 2005. Permasalahan dan kendala Penerapan AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan.  
<http://www.freewebs.com>. Diakses tanggal 7 Juni 2008.
- Heroeputri, Arimbi. 2003. Partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL : sebuah usulan mekanisme penerapannya dalam ontek Indonesia. <http://www.arimbi.com>. Diakses 10 Mei 2008.
- Mukono, H. J. 2005. Kedudukan Amdal dalam pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Jurnal Kesehatan lingkungan, Vol 2, No 1, Juli 2005: 19-28.

- Raharjo, Mursid. 2007. Memahami Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Graha Ilmu. 144 hal
- Setiawan, B. 2000. Peran PSL Dalam Peningkatan SDM Pengelola Lingkungan Di Daerah : Pelajaran dari penyusunan model pelatihan Integrated Environment management. Bandung. 10 hal.
- Sugiyono, Agus. 2002. Kelembagaan lingkungan Hidup di Indonesia. <http://www.geocities.com>. Diakses pada tanggal 23 J uni 2008